

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kelompok Pengrajin Kain Tenun Pulau Ngenang Kota Batam)

Fifit Hidayuwati^{1*}, Fitri Kurnianingsih², Firman Firman³

¹⁻³ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Korespondensi penulis: fifithidayuwati786@gmail.com

Abstract: *In the Riau Islands, especially on Ngenang Island, weaving activities have become part of the life of the Malay community. This initiative to develop and produce woven fabric aims to preserve culture as well as empower women and improve the local economy. This research aims to determine the role of the Batam City Department of Industry and Trade (Disperindag) in empowering the community through groups of woven cloth craftsmen on Ngenang Island. This research uses a qualitative descriptive research method. The data sources for this research come from primary and secondary data. Research results based on (1) support the development of small and medium industries (IKM), including the weaving industry. (2) empowerment efforts carried out through guidance and technical support, which helps in developing technical skills and innovation in woven motifs (3) the government responds quickly to the needs of craftsmen by providing funds, looms and raw materials, increasing production efficiency and quality of woven fabrics resulting from. In conclusion, the role of the government on Ngenang Island is not only as a regulator, but also as a dynamist and facilitator in strengthening the weaving industry as part of an inclusive and sustainable local economic development strategy.*

Keywords: *Role, Community Empowerment, Woven Fabric.*

Abstrak: Di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Ngenang kegiatan menenun telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu. Inisiatif untuk mengembangkan dan memproduksi kain tenun ini bertujuan untuk melestarikan budaya serta memberdayakan perempuan dan meningkatkan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok pengrajin kain tenun di Pulau Ngenang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian berdasarkan (1) mendukung pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), termasuk industri tenun. (2) upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui bimbingan dan dukungan teknis, yang membantu dalam mengembangkan keterampilan teknis dan inovasi motif tenun (3) pemerintah merespons kebutuhan pengrajin dengan cepat melalui penyediaan dana, alat tenun, dan bahan baku, meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas kain tenun yang dihasilkan. Kesimpulan, peran pemerintah di Pulau Ngenang tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai dinamisator dan fasilitator dalam memperkuat industri tenun sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peran, Pemberdayaan Masyarakat, Kain Tenun.

1. LATAR BELAKANG

Tenun adalah kain buatan tangan yang dibuat dengan menenun tekstil (katun, sutra, dll.) melintang ke dalam lungsin. Keberadaan masyarakat Melayu yang juga merupakan penenun di Riau turut memajukan dan memproduksi tenun baik di dalam maupun luar wilayah Pekanbaru. Selain itu, terdapat khazanah yang perlu dikembangkan, diolah, dan diproduksi lebih banyak lagi bagi perempuan, khususnya para ibu dan anak perempuan yang telah lulus atau putus sekolah tersedia satu harta karun yang perlu diolah, dikembangkan, dan ditingkatkan dalam jumlah dan mutu produksinya. Harta karun yang dimaksud adalah tenun Melayu yang telah dan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan turun temurun.

Awal mula adanya Tenun di Pulau Ngenang yaitu pada tahun 2019 yang dibangun oleh Ibu Marlin Agustina Rudi, ia menyebutkan Pulau Ngenang ini akan kami jadikan contoh kampung wisata batam dengan mambangun Rumah Tenun Kejora, Rumah Batik, Kulineran, dan Rumah Rajut. Maka dari itu Pemerintah Kota Batam khususnya di Pulau Ngenang Kecamatan Nongsa Berupaya untuk menciptakan kain tenun buatan jari jemari masyarakat asli Pulau Ngenang dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan pada perekonomian tersebut. Pulau Ngenang memiliki kain tenun yang mana setiap motif seperti rebung, burung walet, bunga manggis, ikan marlin dan lain- lain, memiliki makna tersendiri di daerah sekitarnya. Tenun Pulau Ngenang memang memiliki tema yang unik, yaitu motif tulisan dalam aksara Arab Melayu.

Pemberdayaan masyarakat pada kelompok pengrajin kain tenun Pulau Ngenang Kota Batam masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama adalah menurunnya jumlah pembuat kain tenun ini setiap tahunnya karena adanya pekerja yang tidak serius dalam melakukan pembuatan kain tenun di Pulau Ngenang sehingga Ketua Tenun Pulau Ngenang yaitu ibu Suhana mengurangi jumlah pekerja yang tidak serius dalam pembuatan kain tenun. Kelompok tenun yang tersisa hanya satu dan beranggotakan lima orang penenun.

Situasi sosial ekonomi di Pulau Ngenang masih jauh dari kata sejahtera sebelum pulau ini ditetapkan sebagai tujuan wisata, karena penduduk pulau tersebut secara historis hanya mengandalkan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pulau Ngenang Memiliki potensi yang besar sebagai daerah tujuan pariwisata, dan pulau yang dekat dengan negara tetangga. Kedudukan perempuan di Pulau Ngenang juga sebagai nelayan sehingga pemerintah Kota Batam berupaya melakukan pemberdayaan perempuan melalui kain tenun.

Berdasarkan observasi, para penenun kain di Pulau Ngenang, Kecamatan Nongsa, dipekerjakan sebagai wirausaha masyarakat skala kecil untuk memajukan perekonomian setempat. Salah satu warisan budaya yang berpotensi memacu ekspansi perekonomian daerah adalah kain tenun. Kemampuan menenun kain di Pulau Ngenang memungkinkan perusahaan memperkenalkan produknya baik di dalam negeri maupun internasional serta menembus pasar global. Bahkan hasil tenun Pulau Ngenang ini sudah ada yang dibawa ke Jerman, Australia, Singapore.

Pendapatan dari hasil kain tenun ini setiap tahunnya bertambah artinya peran kain tenun bagi masyarakat Pulau Ngenang sangat berdampak pada perekonomian. Data ini juga didapatkan langsung dari ketua tenun bahwa setiap bulan pada tahun 2020 mencapai 7 Jt, di Tahun 2021 Setiap bulannya mencapai 7,8 Jt, dan di Tahun 2022 Setiap bulannya mencapai 9

Jt. Sebenarnya, pemberian variasi harga terhadap kain tenun tergantung dari motif, jenis bahan benang, dan ukuran kain.

Namun pada umumnya jika pengrajin menjual hasil tenunannya di sanggar tenun dengan cara titip barang, maka harga tersebut sewaktu-waktu dapat berubah. Penetapan harga ini hanya berlaku jika pengunjung membeli tenun langsung dari pihak pertama yaitu pengrajin. Melalui penjualan hasil tenunannya, masyarakat Pulau Ngenang dapat menaikkan perekonomiannya melalui tenun. Mayoritas yang menggeluti kerajinan ini adalah kaum perempuan, yang dengan susah payah menenun kain-kain indah dengan menggunakan peralatan dan adat istiadat yang sederhana.

Melalui pengarahan dan pembinaan kegiatan dengan bantuan bawahannya, Pemerintah Kota Batam efektif berperan sebagai motivator, mendorong dan memberikan semangat kepada masyarakat Pulau Ngenang untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan Pariwisata Pulau Ngenang. Sebagai dinamisator, Pemerintah Kota Batam berperan cukup baik dalam mengajak masyarakat dan semua pihak yang terkait untuk bersinergi dalam pengembangan Wisata Pulau Ngenang. Selain itu adanya keterlibatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tentunya menunjukkan indikator keberhasilan penerapan administrasi negara oleh pemerintah daerah. Dalam situasi di mana orientasi administrasi negara adalah non-profit, pelaku administrasi negara berusaha menciptakan peraturan yang memungkinkan organisasi non-profit untuk menghasilkan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran Pemerintah

Menurut Ndraha (Labolo, 2010:36) peran pemerintah yaitu:

- a. Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat peraturan untuk mengatur penyelenggaraan pembangunan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai alat untuk mengawasi semua tindakan yang berkaitan dengan implementasi pemberdayaan masyarakat.
- b. Peran pemerintah sebagai Dinamisator jika terjadi kendala dalam proses pembangunan, pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat, pemerintah berperan. Bimbingan biasanya diberikan melalui kelompok penyuluh atau badan tertentu untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat.

- c. Peran pemerintah sebagai pendukung memfasilitasi pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan mendampingi masyarakat yang diberdayakan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta pendanaan atau pemodalannya. Mereka berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertip, nyaman, dan aman, termasuk memastikan bahwa sarana dan prasarana pembangunan tersedia.

Pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan dan penyediaan layanan dan infrastruktur akan mendorong pembentukan lingkungan yang dapat membantu kelompok lain dalam komunitas. Redefinisi peran negara diperlukan dalam manajemen, yang juga berarti redefinisi peran warga. Warga memiliki tuntutan yang lebih besar, seperti melacak akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Rusfiana & Supriatna, 2021). Untuk benar-benar memahami fungsi birokrasi pemerintahan, kita harus terlebih dahulu mempelajari beberapa tradisi pemikiran yang ada. Dengan demikian, birokrasi pemerintah harus melakukan tugas yang paling tepat. Peran pemerintah dalam ekonomi dipandang dari dua perspektif. Pertama, pandangan neoliberal berpendapat bahwa campur tangan pemerintah menghambat kebebasan individu, sehingga pemerintah sebaiknya tidak campur tangan dalam urusan ekonomi atau pembangunan. Kedua, pandangan dari kelompok kemakmuran ekonomi, juga dikenal sebagai pendekatan kegagalan pasar, menekankan bahwa pemerintah harus campur tangan dalam penyediaan dan distribusi barang tertentu, seperti barang publik dan inisiatif inovatif. Karena sifatnya yang tidak eksklusif dan digunakan oleh banyak orang, seperti penerangan jalan dan keamanan nasional, barang-barang ini sulit diatur melalui pasar (Iriawan & Edyanto, 2024).

Sangat penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendukung pemilu secara lancar. Tujuannya adalah sebagai berikut: 1) Mengaktualisasikan kehidupan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, dengan memperbaiki penyelenggaraan pemilihan, meningkatkan demokrasi, dan mewujudkan tata pemerintahan presidensial yang efektif; dan 2) Menciptakan lingkungan kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan (Prabowo, 2022).

Peran Administrasi Publik

Para pengambil kebijakan menggunakan administrasi publik sebagai alat utama untuk menentukan strategi manajemen organisasi dan pemerintahan. Kajian kebijakan dalam administrasi publik diperkirakan telah mendapatkan banyak popularitas dalam ilmu administrasi publik, namun sebagai bidang studi yang relatif baru, kajian ini masih bersifat deskriptif dan pengembangannya masih sangat menantang. Dengan menggunakan model-

model yang dibuat dalam disiplin akademis lain, para peneliti secara bertahap mulai menggeneralisasi dan membangun teori mengenai proses pengambilan kebijakan pemerintah (Thoha, 2014).

Cleveland menunjukkan betapa pentingnya administrasi publik dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Dia menyatakan bahwa administrasi publik didirikan untuk memberikan pelayanan publik, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan metode yang efisien dan efektif, dan lebih menguntungkan lagi ketika pemerintah dapat memaksa masyarakat untuk menerima dan menjalankan undang-undang yang lebih baik (Widanti, 2022). Rondinelli menyatakan bahwa untuk mencapai pemerintahan demokratis, peran pemerintah sekarang harus difokuskan untuk membantu masyarakat. Ini harus dicapai melalui inovasi, etika pemerintahan yang baik, pemanfaatan teknologi, penguatan institusi publik, partisipasi dan pengembangan kapasitas, desentralisasi pelayanan, pemberdayaan dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta (Rodiyah et al., 2021).

Pemberdayaan Masyarakat

Upaya untuk memberdayakan individu dengan membantu mereka mengenali potensi mereka dan memilih kegiatan yang paling sesuai dengan tingkat keterampilan mereka disebut pemberdayaan. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih mampu mengenali, mengevaluasi, dan merumuskan solusi untuk masalah fisik, sosial, dan ekonomi. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan tidak dapat dipisahkan.

Pemberdayaan masyarakat adalah istilah yang kadang-kadang sulit dibedakan dari penguatan masyarakat. Pembangunan masyarakat, juga dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat, adalah proses di mana usaha individu disatukan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, dan kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu ke dalam kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan secara penuh untuk kemajuan nasional, menurut Subejo dan Noriaki dalam (Yunus et al., 2017). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mewujudkan kondisi di mana individu, kelompok, atau komunitas memiliki kontrol atas kehidupan mereka sendiri, lebih terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup mereka (Hasdiansyah, 2023)

Pemberdayaan didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengarah pada kemajuan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (Maimunah et al., 2021). Salah satu metode intervensi pemberdayaan adalah kelompok. Pelatihan dan

pendidikan dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat belajar sehingga mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapinya (Hardiyanti & Ma'ru, 2021).

Pengrajin Kain Tenun

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tenun adalah seni membuat benang (kapas, sutra, dll.) ke dalam bahan (kain) dengan memasukkan benang pakan secara melintang ke dalam lungsin (alat, perkakas, dll.). Untuk membuat kain, benang lusi dimasukkan melintasi benang pakan selama proses menenun. Benang lusi adalah benang tenun yang disusun sejajar dan tidak bergerak dengan ikatan di kedua ujungnya. Tenun dibuat dengan kombinasi berbagai warna, motif, bahan, teknik, dan pengolahan yang berbeda menurut nuansa dalam (Krisna et al., 2023).

Di wilayah Jawa terdapat batik, Begitu pula di berbagai wilayah di Indonesia terdapat kerajinan masyarakat yang kental akan budaya dan nilai historinya, yaitu kerajinan kain tenun (Nurhidayati et al., 2022). Pengrajin kain tenun di Pulau Ngenang, Kota Batam, memainkan peran penting dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya tekstil tradisional Indonesia. Sejarah kain tenun di wilayah ini mencerminkan keanekaragaman budaya dan kreativitas masyarakat setempat. Pulau Ngenang, meskipun relatif kecil, memiliki komunitas pengrajin yang berdedikasi dan telah mengabdikan diri mereka pada seni tenun selama beberapa generasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian menggambarkan strategi untuk melakukan penelitian. Dengan menggunakan desain ini, pertanyaan penelitian dimaksudkan untuk dijawab. Penelitian yang bersifat kualitatif atau penjelasan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Lokasi penelitian adalah tempat di mana titik fokus untuk melakukan penelitian. Peneliti dapat dengan mudah melakukan penelitian mereka setelah menemukan titik fokus. Dalam hal ini, peneliti telah memilih untuk melakukan penelitian di Kelurahan Ngenang, yang terletak di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Data yang digunakan meliputi data primer yang dikumpulkan melalui observasi lapangan, observasi langsung, dan wawancara dengan subjek penelitian dan data sekunder tersedia dari sumber yang dipublikasikan agar para peneliti dapat menemukan dan mengumpulkannya. Kutipan dari buku perpustakaan dan media terkait penelitian lainnya digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Penelitian ini menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk meninjau dan memvalidasi temuan.

Peneliti memfokuskan pada Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam serta tantangan dalam melakukan Pemberdayaan masyarakat Pulau Ngenang dengan menggunakan indikator dalam teori peran pemerintah menurut Ndraha (Labolo, 2010:36).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama di lapangan. Metode ini digunakan untuk memperkuat temuan penelitian yang berjudul "Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Pengrajin Kain Tenun Pulau Ngenang Kota Batam)."

Kegiatan menenun telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Melayu. Upaya untuk mengembangkan dan memproduksi kain tenun tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya, tetapi juga untuk memberdayakan perempuan dan meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah dan berbagai pihak bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan industri tenun, sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi di Pulau Ngenang menunjukkan bahwa sebelum dijadikan tujuan wisata, penduduk setempat hanya mengandalkan penangkapan ikan. Setelah pulau ini dikembangkan menjadi desa wisata, pemerintah berupaya memberdayakan perempuan melalui kegiatan menenun. Kain tenun Pulau Ngenang dengan motif yang khas memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Analisis peneliti menggunakan teori Ndraha tentang peran pemerintah, yang mencakup tiga indikator utama: Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator. Indikator-indikator ini dijelaskan sebagai berikut:

Peran Regulator

Pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, mendukung pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), termasuk industri tenun, dengan menyediakan bantuan teknis, pelatihan, dan akses pasar. Di Pulau Ngenang, regulasi dan dukungan pemerintah fokus pada pengembangan ekonomi lokal dengan membangun fasilitas seperti gedung sentra tenun.

DISPERINDAG berperan penting dalam penyediaan sarana, pemberdayaan pengrajin, dan pemasaran produk tenun. Melalui pemberdayaan dan penyediaan fasilitas, DISPERINDAG telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Pulau Ngenang. Hal ini terlihat dari peningkatan infrastruktur dan alat produksi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses produksi, yang secara keseluruhan membantu dalam pengembangan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, pemberdayaan oleh pemerintah melalui DISPERINDAG di Pulau Ngenang terbukti efektif dalam mendukung pengrajin kain tenun.

Selain itu peranan Dinas Kebudayaan fokus pada motif dan aspek budaya dari tenun. Meskipun tidak ada peraturan khusus tentang tenun di peraturan walikota, perhatian terhadap motif Melayu tetap dijaga. Pembagian tugas yang jelas antara dinas menunjukkan upaya koordinasi untuk mendukung industri tenun.

Peran Dinamisator

Pemerintah berperan sebagai regulasi dalam mendukung pengrajin tenun dengan memberikan bimbingan dan dukungan teknis. Peranan Dinas Kebudayaan dalam pendampingan yang berfokus pada dukungan emosional dan teknis bagi para pengrajin. Pendampingan ini mencakup inovasi motif tenun dan koordinasi yang baik antara sektor kebudayaan dan pariwisata. Tantangan dalam menemukan motif khas yang dapat menjadi identitas tenun Pulau Ngenang. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendampingan ini telah memberikan hasil positif dalam pelestarian budaya tenun dan peningkatan kesejahteraan pengrajin.

Pengrajin tenun juga menyatakan bahwa dukungan dari DISPERINDAG sangat signifikan dalam pemberdayaan pengrajin tenun di Pulau Ngenang. Pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah membantu para pengrajin dalam mendalami ilmu baru dan menciptakan inisiatif baru untuk meningkatkan kualitas produksi kain tenun. Upaya melibatkan generasi muda juga menunjukkan komitmen untuk pelestarian budaya dan keberlanjutan industri tenun. Program pembuatan kain tenun telah memberikan alternatif pekerjaan yang lebih stabil bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sebelumnya bergantung pada pekerjaan sebagai nelayan. Pelatihan yang disediakan oleh DISPERINDAG memberikan ide-ide baru dan inovatif yang membantu meningkatkan kualitas produk tenun. Pendampingan dan bimbingan yang terus menerus dari DISPERINDAG memastikan bahwa para pengrajin, termasuk pengrajin baru, dapat berkembang dan mengatasi tantangan yang ada. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan industri tenun.

Integrasi antara sektor kebudayaan dan pariwisata membantu mempromosikan produk tenun sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Tidak hanya meningkatkan penghasilan pengrajin tetapi juga mendukung pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut. Kerjasama yang baik antara pemerintah, pengrajin, dan sektor terkait lainnya menjadi kunci keberhasilan. Pelatihan berkelanjutan, pengembangan keterampilan seperti public speaking dan packaging, serta promosi melalui platform digital menunjukkan upaya konkret untuk meningkatkan daya saing produk tenun. Dukungan yang berkesinambungan dari DISPERINDAG melalui pelatihan, bimbingan, dan promosi memberikan dampak positif yang signifikan. Peran aktif ketua tenun dalam mengkoordinasi pengrajin dan memfasilitasi inovasi serta pengembangan strategi pemasaran adalah kunci keberhasilan lokal. Dalam hal ini menunjukkan pentingnya kepemimpinan lokal dalam menjaga keberlanjutan industri tenun.

Peran Fasilitator

Pemerintah melalui Disperindag memberikan respons yang cepat terhadap kebutuhan pengrajin dengan menyediakan sarana kelengkapan seperti dana, alat tenun, dan bahan baku. Hal ini meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas kain tenun yang dihasilkan. Dukungan dari Dekranasda, mahasiswa, dan masyarakat dalam promosi produk kain tenun sangat berpengaruh. Promosi yang efektif telah membantu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat internasional, meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk kain tenun Pulau Ngenang. Rencana seperti acara fashion show sebagai bentuk promosi yang inovatif menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya tarik produk tenun. Meskipun terdapat hambatan implementasi, seperti jumlah pengrajin yang tetap stabil, langkah-langkah seperti pengembangan ke daerah lain menunjukkan inisiatif untuk mengatasi keterbatasan lokal.

Koordinasi yang baik dari sektor pariwisata dan kebudayaan untuk mendukung pengrajin. Hal ini membantu dalam promosi budaya tenun dan meningkatkan kesejahteraan pengrajin. Pemerintah juga berperan dalam mempromosikan dan memasarkan produk tenun yang melibatkan pengembangan keterampilan seperti public speaking dan packaging, serta partisipasi pengrajin dalam kegiatan kota.

Pengrajin tenun menyatakan bahwa sarana kelengkapan yang disediakan pemerintah sudah memadai dan promosi produk telah membantu memperkenalkan kain tenun ke pasar internasional. Pentingnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan keterampilan dan kualitas produksi kain tenun dan dukungan dari

Dekranasda dan mahasiswa dalam promosi produk juga berkontribusi signifikan dalam memperluas jangkauan pasar.

Dengan demikian, peran fasilitator pemerintah tidak hanya terbatas pada penyediaan sarana fisik dan promosi, tetapi juga melibatkan upaya kolaboratif untuk mendukung pertumbuhan industri tenun sebagai salah satu aset ekonomi dan budaya yang penting bagi Pulau Ngenang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketiga peran pemerintah dalam pengembangan industri tenun di Pulau Ngenang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran krusial dalam memfasilitasi, mengatur, dan menjadi dinamisator dalam mendukung pertumbuhan industri tenun tersebut.

a. Peran Regulator

Pemerintah bertindak sebagai regulator melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Regulasi ini tidak hanya mencakup bantuan teknis dan pelatihan, tetapi juga akses pasar yang mendukung pertumbuhan industri kecil dan menengah, termasuk industri tenun. Fokus pemerintah pada pembangunan infrastruktur seperti gedung sentra tenun menunjukkan komitmen untuk meningkatkan ekonomi lokal sambil melestarikan budaya setempat.

b. Peran Dinamisator

Pemerintah berperan sebagai dinamisator dengan memberikan bimbingan teknis, dukungan untuk pengembangan keterampilan, dan inovasi motif tenun. Pendekatan ini bukan hanya untuk mempertahankan identitas budaya, tetapi juga untuk meningkatkan nilai tambah produk. Integrasi dengan sektor kebudayaan dan pariwisata membantu mempromosikan produk tenun sebagai bagian dari warisan budaya lokal, yang mendukung pariwisata berkelanjutan di Pulau Ngenang.

c. Peran Fasilitator

Pemerintah, khususnya melalui Disperindag, berperan sebagai fasilitator dengan memberikan respons cepat terhadap kebutuhan pengrajin. Sarana kelengkapan seperti dana, alat tenun, dan bahan baku disediakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas kain tenun. Kolaborasi dengan Disbudpar, Dekranasda, mahasiswa, dan masyarakat dalam promosi produk menunjukkan upaya bersama untuk memperluas pasar hingga ke tingkat internasional, sehingga meningkatkan kesadaran dan minat terhadap produk kain tenun Pulau Ngenang.

Berdasarkan analisis peran pemerintah dalam pengembangan industri tenun di Pulau Ngenang, terdapat beberapa saran yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program sebagai berikut:

- a. Koordinasi yang lebih baik antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa aspek teknis dan budaya dari industri tenun saling mendukung. Pembagian tugas yang jelas antara dinas sudah menunjukkan langkah yang baik, namun diperlukan pertemuan rutin dan kerja sama yang lebih erat untuk menyelaraskan tujuan dan strategi misalnya mengadakan rapat koordinasi rutin seperti pertemuan bulanan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk membahas perkembangan, masalah, dan rencana strategis terkait Industri tenun.
- b. Strategi promosi harus lebih inovatif dan melibatkan berbagai platform, termasuk media sosial, pameran internasional, dan kerja sama dengan desainer fashion terkenal. Promosi yang efektif akan membantu memperluas pasar tenun dan meningkatkan pengakuan internasional terhadap produk lokal. misalnya implementasikan kampanye promosi melalui platform seperti Facebook, Tiktok, Shope, dengan konten berkualitas tinggi yang menampilkan keunikan kain tenun.
- c. Kerja sama dengan desainer dan akademisi untuk mengembangkan motif baru yang tetap menjaga identitas budaya Melayu sangat penting. Inovasi dalam desain dan produk tenun akan membantu meningkatkan daya tarik dan daya saing produk di pasar global. Misalnya melibatkan akademisi dari universitas yang memiliki program studi desain atau tekstil untuk penelitian dan pengembangan motif tenun baru yang tetap mencerminkan budaya melayu, mengadakan workshop rutin bagi pengrajin tenun yang melibatkan desainer untuk berbagi Teknik dan ide desain inovatif.
- d. Pemerintah dapat mengembangkan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dan mudah diakses bagi pengrajin tenun, misalnya melalui program pinjaman dengan bunga rendah seperti Kredit Usaha Rakyat untuk pengembangan usaha.

DAFTAR REFERENSI

- Hardiyanti, Y. F., & Ma'ru, M. F. (2021). Kajian pemberdayaan masyarakat melalui Bangkodir (Bangil Kota Bordir) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Publika*, 9(1), 174.
- Hasdiansyah. (2023). Pemberdayaan masyarakat. *Eureka Media Aksara*.
- Iriawan, H., & Edyanto. (2024). *Birokrasi Indonesia*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

- Krisna, A., Izzatusholekha, Samudra, A. A., & Purnama, R. (2023). Kebijakan pemerintah daerah untuk mengembangkan industri kreatif (Studi pada industri kecil menengah di Bali). *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 41.
- Maimunah, E. I., Hidayat, Z., & Priyadi, B. P. (2021). Manajemen pengembangan industri batik Grobogan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. *Journal of Public Policy and Management*, 10(2).
- Nurhidayati, S., Edrial, & Novitasari, D. (2022). Peran Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dalam pemberdayaan pengrajin kain tenun Kre Alang di Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 3(2), 176.
- Prabowo, H. (2022). Birokrasi dan pelayanan publik. Bimedia Pustaka Utama.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). Pengantar ilmu administrasi publik. Umsida Press.
- Rusfiana, Y., & Supriatna, C. (2021). Memahami birokrasi pemerintahan dan perkembangan. Alfabeta, CV.
- Thoha, M. (2014). Perilaku organisasi konsep dasar dan aplikasinya (23rd ed.). Rajawali Pers.
- Widanti, N. P. T. (2022). Prinsip administrasi publik. Jagat Langit Sukma.
- Yunus, S., Suadi, & Fadli. (2017). Model pemberdayaan masyarakat terpadu. Bandar Publishing.